

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia telah berkembang dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang banyak membantu manusia dalam hal meningkatkan kualitas hidup setiap individu. Perkembangan dari segi teknologi membawa perubahan besar dalam hidup manusia terutama dalam bidang ekonomi. Perkembangan yang dialami bangsa Indonesia lewat ilmu pengetahuan dan teknologi ternyata belum dapat menyelesaikan permasalahan dan penderitaan yang ada dalam masyarakat luas. Situasi tersebut mendukung muncul banyak organisasi yang bergerak dalam bidang sosial atau dengan sebutan lain organisasi nonlaba.

Sebelumnya organisasi nonlaba sering disebut organisasi nirlaba, sebutan ini pada tahun lalu mengalami perubahan yang disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) yang melihat menggunakan kata *not for profit* (nirlaba) tidak semata-mata menunjukkan bentuk negatif atau lawan dari *profit activities*, sehingga penggunaan kata nir (yang berarti tidak atau bukan) dinilai kurang tepat, sehingga diganti dengan kata yang tepat adalah nonlaba. Pada saat itu juga terjadi pencabutan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) No.45 yang mengatur tentang Penyajian Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba, sehingga disahkan ISAK 35 sebagai interpretasi pengganti SAK No.45 yang mengatur organisasi nirlaba sebelumnya sesuai dengan amandemen PSAK 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan (IAI, 2019). Standar akuntansi merupakan pedoman umum atau standar praktik akuntansi terkait penyusunan laporan keuangan yang merupakan pernyataan resmi tentang masalah akuntansi, juga agar

terjadi keseragaman dalam penyajian laporan keuangan, yang dikeluarkan oleh badan yang berwenang dan berlaku. Berbagai pihak semakin menyadari peranan akuntansi dalam segi pengelolaan keuangan sebuah organisasi, baik itu organisasi yang berorientasi pada laba maupun nonlaba (Leiwakabessy, 2015).

Organisasi nonlaba atau organisasi non *profit* adalah suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk suatu tujuan yang tidak komersial, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang mencari laba. Karakteristik organisasi nonlaba berbeda dengan organisasi bisnis. Perbedaan utama yang mendasar terletak pada cara organisasi nonlaba memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasinya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomis yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. Sebagai akibat dari karakteristik tersebut, dalam organisasi nonlaba timbul transaksi tertentu yang jarang atau bahkan tidak pernah terjadi dalam organisasi bisnis misalnya penerimaan sumbangan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2019). Lembaga keagamaan, rumah sakit, sekolah negeri dan organisasi yang termasuk jasa sukarelawan (*volunteer*) merupakan contoh organisasi nonlaba.

Gereja memiliki relasi dengan uang dan harta benda sudah terjadi sejak awal berdirinya. Pengelolaan harta gerejawi menjadi perhatian yang sangat besar mengingat hukum gereja mewajibkan adanya Dewan Keuangan disetiap Paroki. Hal ini yang mendorong gereja dalam pengelolaan keuangannya dilakukan secara transparan dan akuntabel. Laporan keuangan tersebut sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada pihak internal atau eksternal atas sumber daya yang dipercayakan. Praktik dalam menyajikan laporan keuangan gereja tersebut sesuai dengan pedoman dan *standart* yang diatur oleh Dewan Keuskupan.

Keuskupan Agung Medan telah mengeluarkan Surat Keputusan tentang pedoman Penyusunan Laporan Keuangan. Pedoman yang digunakan saat ini adalah Pedoman Keuangan dan Akuntansi Paroki (PKAP) serta Petunjuk Teknis Keuangan dan Akuntansi Paroki (PTKAP), sehingga laporan keuangan yang dibuat oleh setiap Paroki yang dibawahinya (gereja stasi) harus dalam bentuk yang sama. Tujuannya sama yaitu menciptakan keseragaman dalam penerapan perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan sehingga meningkatkan daya banding diantara laporan keuangan Paroki. Acuan pokok PKAP dan PTKAP dalam membuat laporan keuangan adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), (Rosariana, 2018). Untuk itu alasan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengeluarkan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan 35 tentang Penyajian Laporan Keuangan adalah untuk mengatur pelaporan keuangan organisasi nonlaba dan diharapkan laporan keuangan dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi dan memiliki daya banding yang tinggi (ISAK, 2019).

Gereja Katolik St. Petrus Kwala Bekala merupakan Gereja Stasi yang dinaungi oleh Paroki St. Fransiskus Asisi Pd. Bulan Medan dan termasuk wilayah Keuskupan Agung Medan. Hal yang menjadi satu persoalan pada gereja yaitu dalam hal pengelolaan keuangan dan upaya menginformasikan keuangan gereja stasional. Permasalahan-permasalahan yang terjadi pada gereja terkait keuangannya, sering tidak diperhatikan secara profesional oleh pihak-pihak manajemen yang bertanggungjawab dan akhirnya tidak ditindak lanjuti dengan tegas dengan alasan bahwa ini adalah organisasi keagamaan atau lembaga sosial, sehingga permasalahan tersebut diselesaikan berdasarkan kasih. Gereja Stasi St. Petrus tersebut belum memiliki sistem akuntansi untuk pelaporan keuangannya,

pencatatan transaksi dan penyusunan laporan yang dilakukan gereja masih sangat sederhana, gereja juga belum mencatat seluruh aset, hal itu dikarenakan kurangnya pemahaman mengenai standar yang harus digunakan oleh gereja. Salah satu faktor yaitu kurangnya sumber daya manusia dan keterbatasan waktu mengambil peran untuk memahami penyusunan laporan keuangan sesuai dengan ISAK 35 sehingga laporan keuangan yang dibuat Gereja Stasi St. Petrus hanya laporan penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk buku kas.

Dengan demikian penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang diinformasikan gereja sangatlah penting, baik bagi pihak intern maupun ekstern organisasi tersebut. Mengingat pentingnya keterbukaan dalam laporan keuangan sehingga pertanggungjawaban semakin jelas, maka penulis mencoba mengetahui lebih dalam mengenai penyajian laporan keuangan gereja dengan judul skripsi yaitu: “PENERAPAN ISAK 35 TENTANG LAPORAN KEUANGAN ORGANISASI NONLABA (Studi Kasus Pada Gereja Katolik Stasi St. Petrus Kwala Bekala Medan)”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana penerapan SAK pada Gereja Katolik Stasi St. Petrus Kwala Bekala yang sesuai dengan ISAK 35?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan laporan keuangan di Gereja Katolik Stasi St. Petrus Kwala Bekala Medan dengan laporan keuangan yang sudah diatur sesuai dengan ISAK 35.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis, melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman yang lebih lagi dalam mengimplementasikan teori yang telah didapat selama menempuh pendidikan terkait lembaga nonlaba serta dalam hal penyajian laporan keuangannya.
2. Bagi organisasi gereja, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan atau saran kepada pihak-pihak Gereja terkait, serta untuk membantu mempermudah Gereja Katolik Stasional dalam membuat laporan keuangan yang baik dan benar sesuai ISAK 35 demi perkembangan Gereja.
3. Bagi lingkungan akademis, melalui penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi untuk penelitian yang sama.

#### **1.5 Ruang Lingkup**

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah data, data yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan dalam penelitian ini hanya berdasarkan data selama satu tahun dalam satu tahun periode berjalan. Ruang lingkup penelitian ini yaitu proses pengakuan transaksi, pengukuran akuntansi, proses penyusunan laporan keuangan dan penyajian sesuai ISAK 35.